

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks desentralisasi anggaran saat ini, perkembangan ekonomi regional menjadi elemen kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang merata dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing antar wilayah diperlukan untuk dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dengan cara yang efisien. Pemerintah daerah tidak hanya diharapkan menjadi pelaksana kebijakan dari pusat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pembangunan yang fokus pada kemandirian fiskal, distribusi kesejahteraan, dan peningkatan layanan publik (Susanto & Sugiyanto, 2019).

Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi sejak awal 2000-an sebagai upaya untuk memperkuat pemerintahan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Melalui UU Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan, desentralisasi juga mencakup berbagai objek dan benda alam sebagai bagian dari kebutuhan daerah untuk tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Akan tetapi, meskipun desentralisasi telah berlangsung hampir dua dekade, realita menunjukkan bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah (Fadhilla et al., 2025)

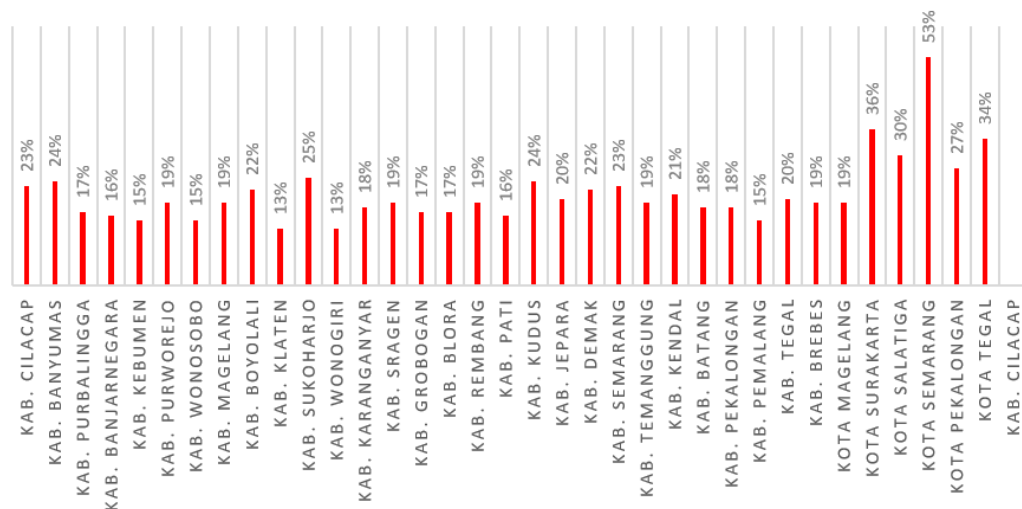
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur bahwa pendapatan

pemerintah daerah mencakup pendapatan asli daerah (PAD), yang merupakan akumulasi dari berbagai pos penerimaan. PAD terdiri dari pos penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak seperti hasil usaha milik daerah, serta pos penerimaan investasi dan pengelolaan sumber daya alam (Edwar et al., 2002).

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai alat yang signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, semakin baik kemampuan daerah tersebut dalam mengatur pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat. Namun, dalam kenyataannya banyak wilayah di Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten dan kota, masih mengalami masalah terkait rendahnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (Khoryani et al., 2025). Wilayah yang memiliki ekonomi yang kuat, seperti industri, perdagangan, atau pertanian yang produktif, biasanya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki ekonomi yang terbatas (Sulaeman & Hanifah, 2022).

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak di Indonesia, dengan total 35 daerah otonom yang masing-masing memiliki karakteristik ekonomi yang beragam. Sebagai provinsi yang berbasis pada pertanian dan juga berkembang di sektor industri, Jawa Tengah mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) melalui pemanfaatan pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pengembangan kekayaan daerah. Dengan beragamnya karakteristik ekonomi tersebut, kemampuan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan tingkat yang berbeda-beda. Perbedaan struktur ekonomi ini berimplikasi langsung pada tingkat kemandirian fiskal daerah, yang tercermin dari variasi persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

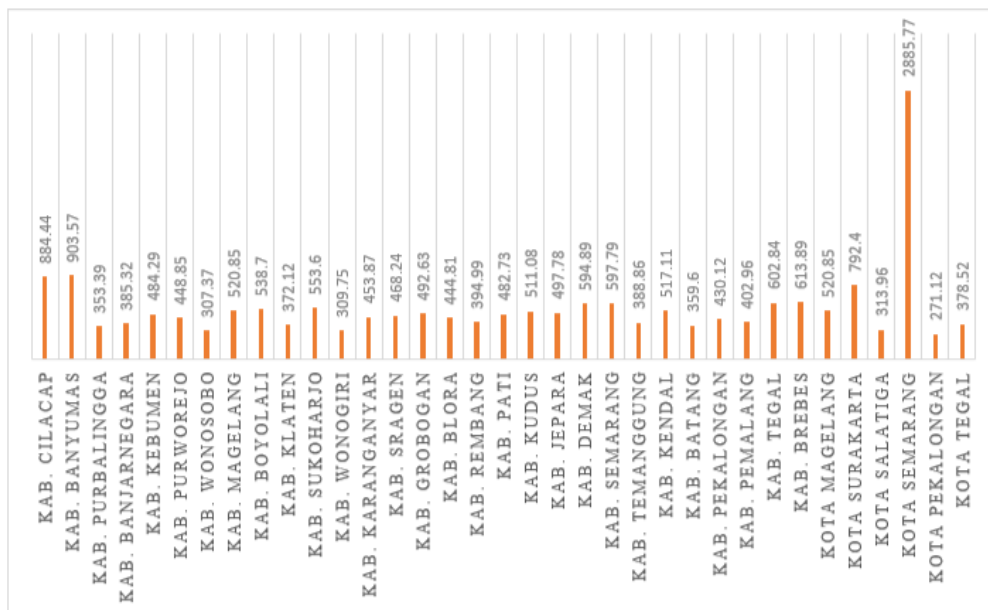


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (data diolah)

Gambar 1.1 Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2024 (%)

Gambar 1.1 menunjukkan perbedaan persentase antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yang menggambarkan variasi kapasitas daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan. Perbedaan ini berkaitan erat dengan tingkat kemandirian fiskal daerah, di mana wilayah dengan persentase lebih tinggi yang umumnya berupa kota cenderung memiliki kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kuat. Hal ini berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Sebaliknya, kabupaten dengan

persentase lebih rendah cenderung memiliki kemandirian fiskal yang masih terbatas karena basis ekonomi dan potensi pajak daerah yang belum optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan kemandirian fiskal antar daerah tetap menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pembangunan yang adil.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (data diolah)

Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2024 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 memiliki perbedaan yang cukup besar. Kota Semarang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi sebesar sekitar Rp2.885,77 miliar, diikuti oleh beberapa kota besar lainnya seperti Kota Surakarta dan Kota Pekalongan. Sementara itu, sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah masih memiliki PAD di bawah Rp500 miliar, seperti Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Klaten. Situasi ini menunjukkan bahwa

kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli masih beragam, tergantung pada potensi ekonomi dan kemampuan mengelola keuangan di masing-masing wilayah.

Perbedaan dalam kemampuan Pendapatan Asli Daerah antara kabupaten dan kota menciptakan kesenjangan fiskal yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Daerah dengan PAD yang rendah cenderung memiliki ruang fiskal yang sempit, mengakibatkan belanja pembangunan yang terbatas, sedangkan daerah dengan PAD yang tinggi mampu mendanai program pembangunan yang lebih luas (Soeharjoto, 2018).

Menurut Oates (1972), teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik dan pertumbuhan ekonomi lokal ini menuntut kemampuan daerah dalam mengelola potensi fiskalnya secara mandiri. Hal tersebut sejalan dengan teori kemandirian fiskal yang dikemukakan oleh Halim (2004), yang menekankan pentingnya kemampuan daerah membiayai pengeluarannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Fadhillah, Nisa dan Putri (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat menghambat inovasi fiskal daerah.

Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam menarik investasi juga menjadi faktor penting yang berperan dalam memperkuat basis penerimaan daerah dan mendorong peningkatan PAD. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat lokal karena dapat memperluas basis perpajakan, menghasilkan kerja baru. Melalui investasi

dalam negeri, daerah mendapatkan dampak berganda berupa kenaikan daya beli masyarakat dan perkembangan sektor-sektor terkait yang selanjutnya berkontribusi pada pendapatan daerah (Tianto, 2022).

Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Tengah semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa pada semester pertama tahun 2025, total investasi di Jawa Tengah mencapai Rp45,58 triliun, di antaranya sebesar Rp19,95 triliun berasal dari PMDN, yang menyumbang sekitar 44 persen dari total investasi tersebut. PMDN ini didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota, dengan Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang memiliki realisasi PMDN tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Kendal, Blora, Banyumas, dan Tegal. Penyebaran PMDN ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor lokal terhadap iklim usaha di daerah tersebut. Selain itu, PMDN juga berkontribusi pada pembuatan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal, yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025).

Menurut teori Harrod-Domar yang dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1939) dan Evsey D. Domar (1946) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada tingkat investasi, yaitu pembentukan modal, dan efisiensi cara modal digunakan. Teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi investasi dari dalam negeri yang masuk ke suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan produksi dan aktivitas ekonomi yang tercipta. Hal ini berdampak

pada peningkatan penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, atau hasil pengelolaan aset daerah.

Sopian, Effendi, dan Noor (2022), dalam penelitiannya menyebutkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah salah satu faktor kunci dalam memperkuat kapasitas ekonomi daerah. Investasi menciptakan peningkatan *output* melalui pembentukan modal baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi, terutama industri dan jasa. Aktivitas ekonomi yang tumbuh dari investasi ini secara tidak langsung meningkatkan basis pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, dan pajak usaha lainnya, yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aloisius dan Panggabean (2023) menemukan bahwa meskipun investasi domestik (PMDN) menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penerapannya di tingkat daerah tidak selalu langsung tercermin dalam peningkatan PAD, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan kebijakan daerah.

Selanjutnya terkait dengan faktor ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pendapatan suatu daerah yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusianya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurut laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di daerah tersebut terus meningkat. Pada Agustus 2024, TPAK mencapai 73,74 persen, naik sekitar 2,02 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan TPAK menunjukkan semakin banyak

orang usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Ini menjadi indikator penting mengenai perkembangan ekonomi daerah. Aktivitas pasar tenaga kerja yang meningkat ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang mulai pulih setelah masa pandemi. Hal ini berpotensi mendorong peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat di berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Dengan demikian, secara tidak langsung memberi peluang peningkatan penerimaan daerah melalui pajak dari sektor usaha dan jasa lokal yang berkembang karena partisipasi tenaga kerja yang lebih tinggi (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Menurut Teori Penawaran Tenaga Kerja, yang menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk bekerja di pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh peluang kerja dan insentif ekonomi yang ada di suatu wilayah. Semakin banyak peluang kerja dan semakin baik kondisi ekonomi suatu daerah, maka semakin banyak orang usia kerja yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (Borjas, 2020). TPAK tinggi mencerminkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, baik dari sisi produksi maupun konsumsi (Margono & Nuryadin, 2023).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, peningkatan TPAK menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menciptakan kondisi ekonomi yang bisa menggerakkan tenaga kerja yang produktif, sehingga meningkatkan potensi PAD melalui pajak daerah serta retribusi dan pendapatan lainnya yang berasal dari kegiatan ekonomi lokal (Afifatul Ulah, 2025).

Penelitian oleh Putri dan Haryanto (2021) menunjukkan bahwa TPAK

berdampak positif terhadap pendapatan daerah melalui peningkatan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota. Penelitian lain oleh Ramadhan dan Sari (2022) juga menemukan bahwa daerah dengan partisipasi tenaga kerja yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik. Temuan-temuan ini memperkuat pentingnya menggunakan TPAK sebagai variabel penjelas bagi PAD, sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan dalam teori penawaran tenaga kerja.

Selain itu, produktivitas sektor unggulan, seperti produktivitas padi, juga menjadi indikator penting dalam menentukan kapasitas daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena sektor ini berkontribusi langsung terhadap basis ekonomi lokal (Masruro & Subkhania, 2024).

Menurut teori pertumbuhan ekonomi regional Richardson tahun 1973, sektor pertanian berperan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena hasil-hasilnya meningkatkan pendapatan penduduk dan memicu kegiatan ekonomi lainnya. Saat hasil padi meningkat, pendapatan petani dan masyarakat sekitar ikut bertambah, sehingga mendorong perdagangan, produksi barang turunannya, serta jasa terkait, yang pada akhirnya memperkuat basis ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Masrur & Subkhania, 2024).

Contohnya, pajak hasil bumi dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meningkat karena nilai tanah pertanian menjadi lebih tinggi dan penggunaannya semakin intensif akibat peningkatan hasil produksi, hal ini dapat tercermin melalui kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar

pengenaan PBB-P2 yang mengikuti perkembangan nilai pasar tanah di daerah tersebut (Rafshanjani et al., 2025). Selain itu, beberapa pajak usaha dan perdagangan hasil padi, seperti pajak restoran, pajak jasa angkutan hasil panen, dan pajak reklame untuk promosi beras lokal, juga cenderung naik seiring meningkatnya dinamika ekonomi pertanian (Putri & Alfa, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas padi secara langsung berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui berbagai jenis pajak dan retribusi (Hernandi et al., 2025).

Untuk retribusi daerah mengalami peningkatan pada penggunaan pasar, timbangan hasil produksi padi, layanan irigasi, serta jasa usaha lain yang mendukung produktivitas padi. Pengelolaan kekayaan daerah seperti kerja sama pengelolaan lahan, penggunaan jaringan irigasi, dan penyewaan aset daerah juga yang mendukung kegiatan pertanian juga memberi kontribusi tambahan kepada penerimaan daerah (Setyawati & Faridatussalam, 2023; Rachman, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmayanto, Listiana, dan Hasanuddin (2022) menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti luas lahan, jenis benih, penggunaan pupuk, dan jumlah tenaga kerja mempunyai dampak besar terhadap peningkatan hasil panen dan pendapatan dari usaha tani padi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas padi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keadaan ekonomi daerah.

Dengan demikian, peningkatan produktivitas padi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para petani, tetapi juga memperluas sumber penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta pendapatan dari

pengelolaan sumber daya daerah (Sasana, 2021).

Selanjutnya, adanya pengelolaan daya tarik wisata menjadi faktor penting yang bisa mendorong kegiatan ekonomi lokal serta memperluas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota terutama di Provinsi Jawa Tengah.

Data statistik pariwisata tahun 2024 menunjukkan bahwa ada sebanyak 69.480.726 kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah ini mencakup kunjungan dari wisatawan dalam negeri dan luar negeri ke berbagai kabupaten dan kota. Beberapa daerah yang mendapat kunjungan terbanyak adalah Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, dan Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi wisata di daerah tersebut sangat diminati. (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Pengembangan daya tarik wisata berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan ekonomi melalui menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan permintaan akan sektor pendukung seperti transportasi, akomodasi, dan kuliner (Prasetyo & Kurniawan, 2020).

Teori *Tourism-Led Growth Hypothesis* menyatakan bahwa pengembangan pariwisata bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan jumlah wisatawan dan pengeluaran mereka (Balaguer & Cantavella-Jordá, 2002). Dalam teori ini, daya tarik wisata dianggap sebagai faktor utama yang menarik wisatawan ke suatu wilayah, sehingga memicu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya dan memperluas jumlah pendapatan daerah. Dalam sistem keuangan yang terdesentralisasi, meningkatkan daya tarik wisata memungkinkan pemerintah

daerah memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara mandiri, sehingga meningkatkan PAD melalui pajak dari hotel, restoran, hiburan, serta retribusi objek wisata (Muji & Setyawa, 2025).

Penelitian oleh Wahyuni dan Haryanto (2022) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata, yang diwujudkan melalui jumlah dan keberadaan daya tarik wisata, berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD kabupaten/kota. Penelitian lain, oleh Sari dan Kurniawan (2021), juga menemukan bahwa daerah yang memiliki objek wisata berkembang cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi karena meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah kunjungan wisatawan. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa daya tarik wisata adalah variabel penting dalam menjelaskan peningkatan PAD, sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan dalam *Tourism-Led Growth Hypothesis*.

Berdasarkan fenomena pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, kondisi ekonomi tiap daerah menunjukkan perbedaan yang cukup besar, yang bisa dilihat dari variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan ini menunjukkan ada ketidakmerataan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan mereka. Beberapa daerah masih kesulitan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meskipun memiliki potensi ekonomi yang tinggi, yang menunjukkan adanya masalah-masalah dalam memanfaatkan investasi, partisipasi tenaga kerja, kinerja sektor pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat pendapatan daerah.

Meskipun sudah banyak penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, studi yang secara bersamaan menganalisis

dampak Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), produktivitas padi, dan daya tarik wisata di tingkat kabupaten/kota masih terbatas. Keterbatasan ini menciptakan celah untuk penelitian lebih lanjut, terutama mengenai peran produktivitas padi sebagai gambaran dari kinerja sektor pertanian yang jarang dianalisis dalam konteks Pendapatan Asli Daerah, terutama di daerah dengan karakteristik pertanian yang kuat seperti Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menekankan produktivitas padi sebagai salah satu variabel penting, sekaligus memberikan analisis yang menyeluruh tentang “Determinan Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021–2024” dengan pendekatan faktor investasi, tenaga kerja, pertanian, dan pariwisata.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas padi, dan daya tarik wisata secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas padi, dan daya tarik wisata secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 2021-2024?
3. Bagaimana elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap penanaman modal

dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas padi dan daya tarik wisata kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas padi, dan daya tarik wisata secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2021-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas padi, dan daya tarik wisata secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2021-2024.
3. Mengetahui elastisitas pendapatan asli daerah terhadap penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas padi dan daya tarik wisata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2021-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam bidang ekonomi regional dan keuangan daerah terkait determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kebaruan pada penggunaan variabel produktivitas padi dan daya tarik wisata yang belum pernah diteliti pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024, sehingga dapat memperluas kajian mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi PAD serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Manfaat bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan untuk pertimbangan pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini digunakan sebagai dasar atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi lain untuk melakukan studi lanjutan yang lebih mendalam, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu serta menambah wawasan yang didapat selama perkuliahan, khususnya mengenai penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas padi dan daya tarik wisata dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021-2024 dengan sumber data melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2026																			
		2025				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan <i>outline</i> dan rekomendasi pembimbing	■																			
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan		■																		
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal			■																	
4	Seminar Proposal Skripsi				■																
5	Revisi Proposal Skripsi dan persetujuan revisi					■	■														
6	Pengumpulan dan pengolahan data							■													
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Seminar Hasil								■	■	■	■	■								
8	Seminar Hasil												■								
9	Revisi Seminar Hasil dan persetujuan revisi													■							
10	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■
11	Sidang Skripsi																				■
12	Revisi Sidang Skripsi dan persetujuan revisi																				■